



**BERHENTI  
MENGAYOMI  
KORUPSI**

# Membongkar Masalah Pembangunan Ibu Kota Negara

Wana Alamsyah  
Divisi Pengelolaan Pengetahuan

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

# LATAR BELAKANG



1. Megaproyek IKN yang bermasalah sejak awal Undang-undang disahkan
2. Megaproyek IKN yang mengabaikan aspek lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat sekitar
3. Mundurnya Ketua dan Wakil Ketua mengindikasikan ada permasalahan yang cukup serius dalam tata kelola IKN.
4. Maraknya potensi kecurangan dalam pembangunan infrastruktur sehingga proses pelaksanaan pengadaan dan potensi korupsi membayangi pembangunan IKN.

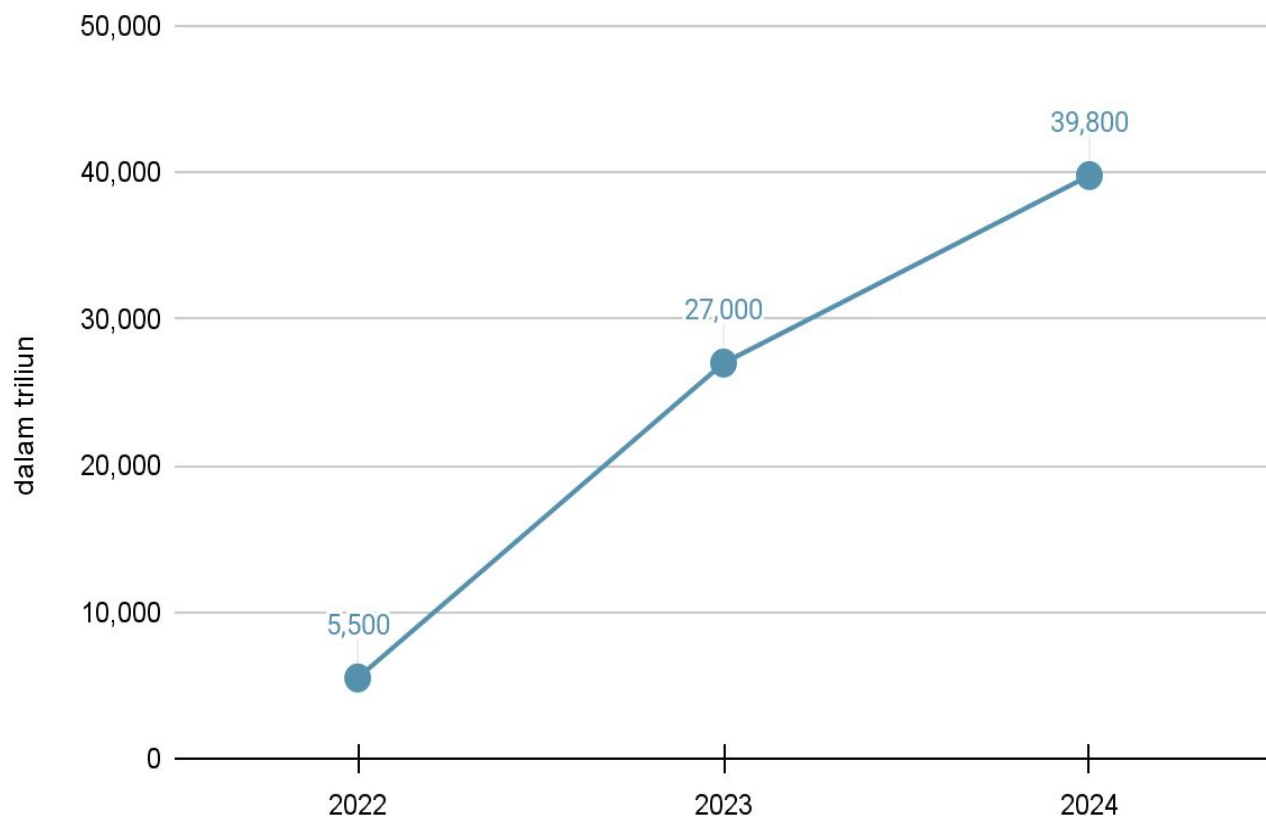
# SUMBER DATA



1. Opentender dan SiRUP LKPP
2. Kata kunci: IKN, Ibu Kota Negara, KIPP, Rumah Susun, Kantor Menteri
3. Batasan pemantauan: 2017-2023; pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah (tidak termasuk pengadaan tanah)



# GAMBARAN UMUM BELANJA APBN UNTUK IKN (VERSI PEMERINTAH)



Total alokasi anggaran IKN dari tahun **2022 hingga 2024 sebesar Rp72,3 triliun.**

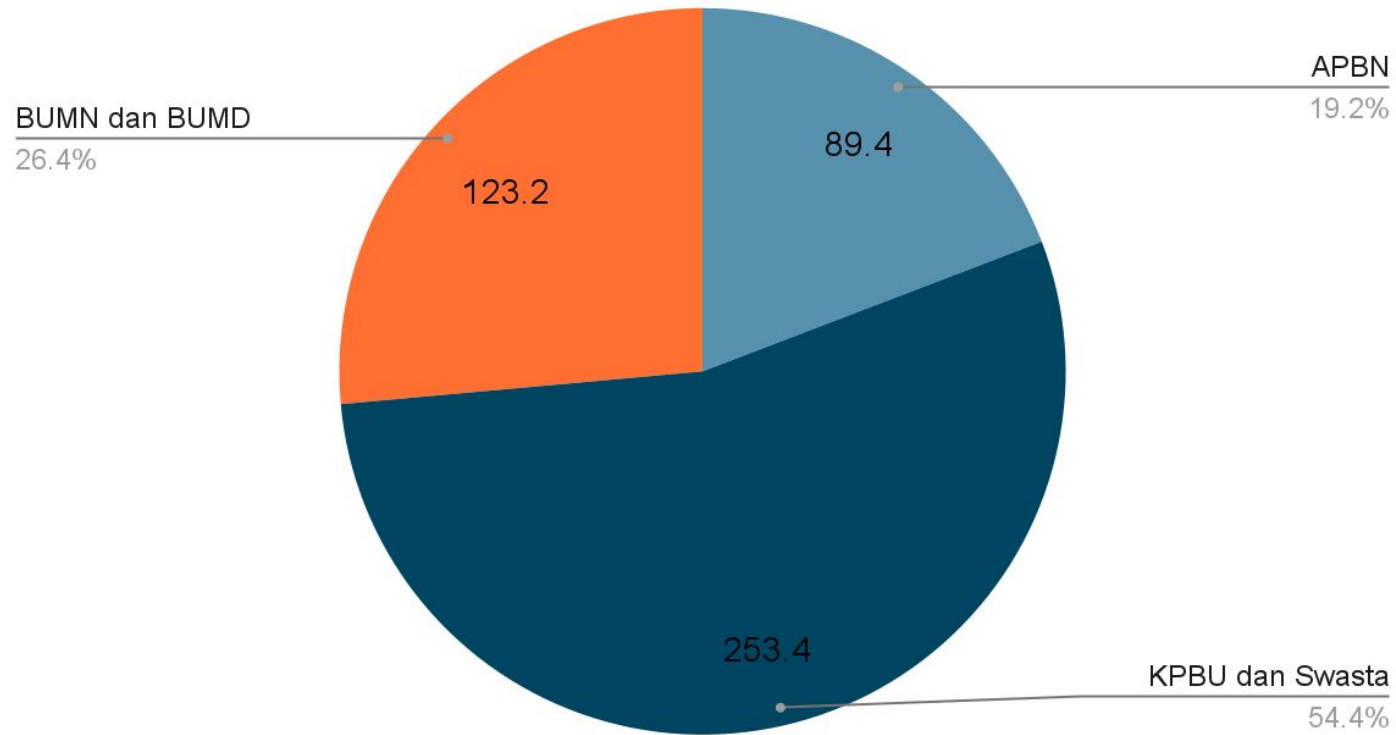
Realisasi penggunaan APBN tahun 2022 sebesar **Rp5,5 triliun**, 2023 sebesar **Rp27 triliun**, dan rencana alokasi 2024 sebesar Rp39,8 triliun.

sumber: olah data media



# GAMBARAN UMUM BELANJA APBN UNTUK IKN (VERSI PEMERINTAH)

Komposisi Anggaran IKN (Rp triliun)



Total anggaran IKN sebesar **Rp466 triliun**, APBN berkontribusi hampir **20 persen**

sumber: [ikn.go.id](http://ikn.go.id)

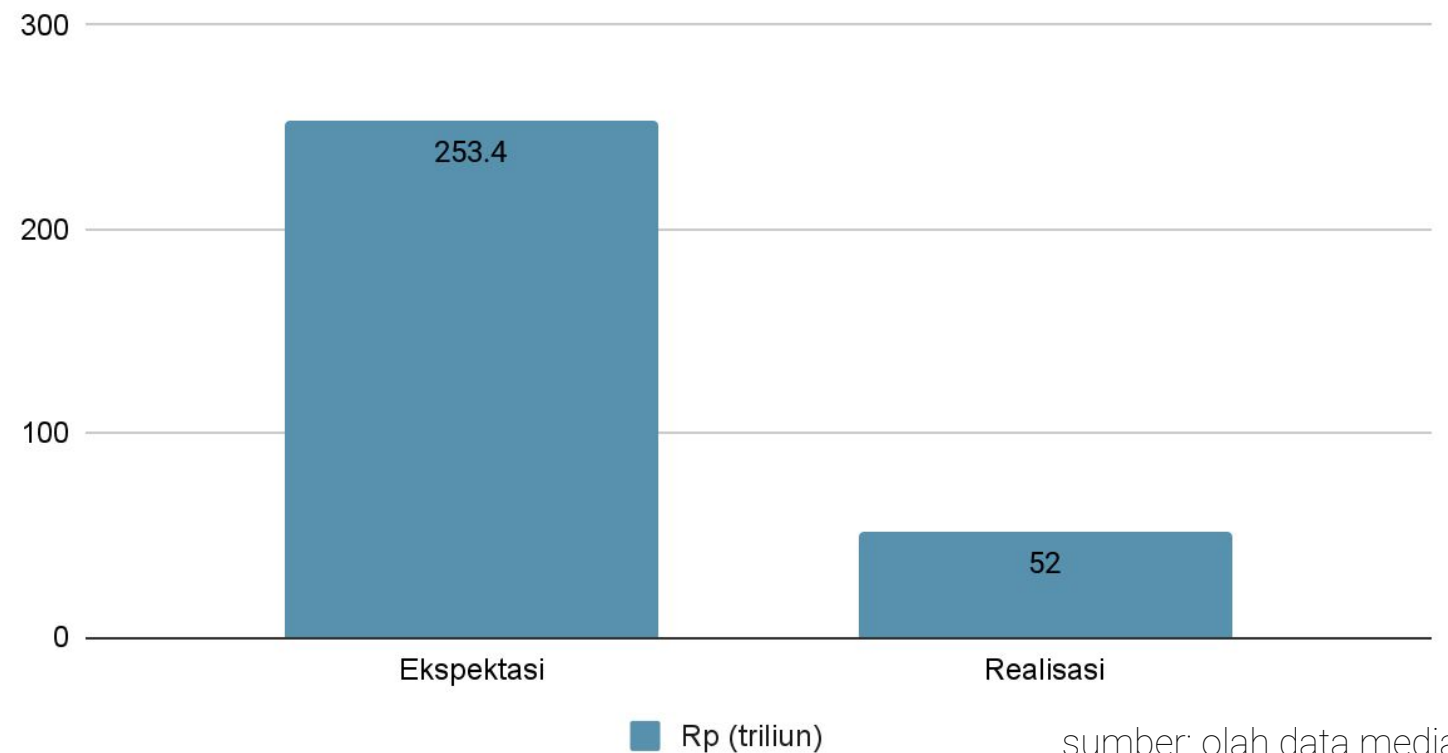


# GAMBARAN UMUM BELANJA APBN UNTUK IKN (VERSI PEMERINTAH)

Sejak 2023 hingga per Juni 2024, Pemerintah baru dapat menarik investasi sebesar **20,52 persen**

**Padahal** target investasi hingga akhir 2024 diharapkan mencapai Rp100 triliun. Akankah tercapai?

Rencana vs Realisasi Investasi IKN per awal Juni 2024



sumber: olah data media



# DAFTAR INVESTOR IKN

<b>Per April 2023, sedikitnya 5 investor telah mendapat <i>Letter to Proceed</i> (LTP) untuk membangun hunian bagi ASN, yaitu:</b>	<b>Akhir 2023, investasi groundbreaking tahap 1 sebesar Rp23 triliun terdiri dari 10 perusahaan dalam Konsorsium Nusantara:</b>	<b>Groundbreaking tahap 2 pada akhir 2023 bernilai investasi sebesar Rp13,1 triliun, dilakukan oleh:</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA),</li><li>2. Konsorsium Nusantara (CCFG Corp dan RBN),</li><li>3. Korean Land and Development,</li><li>4. Konsorsium PT Perintis Trinita Properti Tbk. (TRIN) dengan nilai investasi Rp1,8 triliun untuk membangun 7 tower hunian,</li><li>5. PT Nindya Karya (Persero) dengan nilai investasi Rp1,42 triliun untuk membangun 8 tower hunian</li></ol>	<p>Agung Sedayu Group (Lead Konsorsium),</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Salim Group,</li><li>2. Sinar Mas,</li><li>3. Pulau Intan,</li><li>4. Djarum,</li><li>5. BCA Group,</li><li>6. Wings Group,</li><li>7. Adaro Group,</li><li>8. Barito Pacific,</li><li>9. Mulia Group,</li><li>10. Astra Group.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,</li><li>2. Mayapada Hospital,</li><li>3. Pakuwon Group,</li><li>4. JIS,</li><li>5. Hermina,</li><li>6. Bank Indonesia,</li><li>7. BPJS Ketenagakerjaan,</li><li>8. PLN Indonesia</li></ol>

sumber: [ikn.go.id](http://ikn.go.id)



Investasi yang masuk hingga **awal Juni 2024** sekitar **Rp52 triliun** dengan mayoritas **investor domestik**. Hal ini menandakan bahwa: **perencanaan** anggaran IKN meleset; pembangunan IKN **membebani keuangan negara**; tidak banyak investor asing yang masuk dikarenakan **iklim investasi dan sistem yang masih korup**.

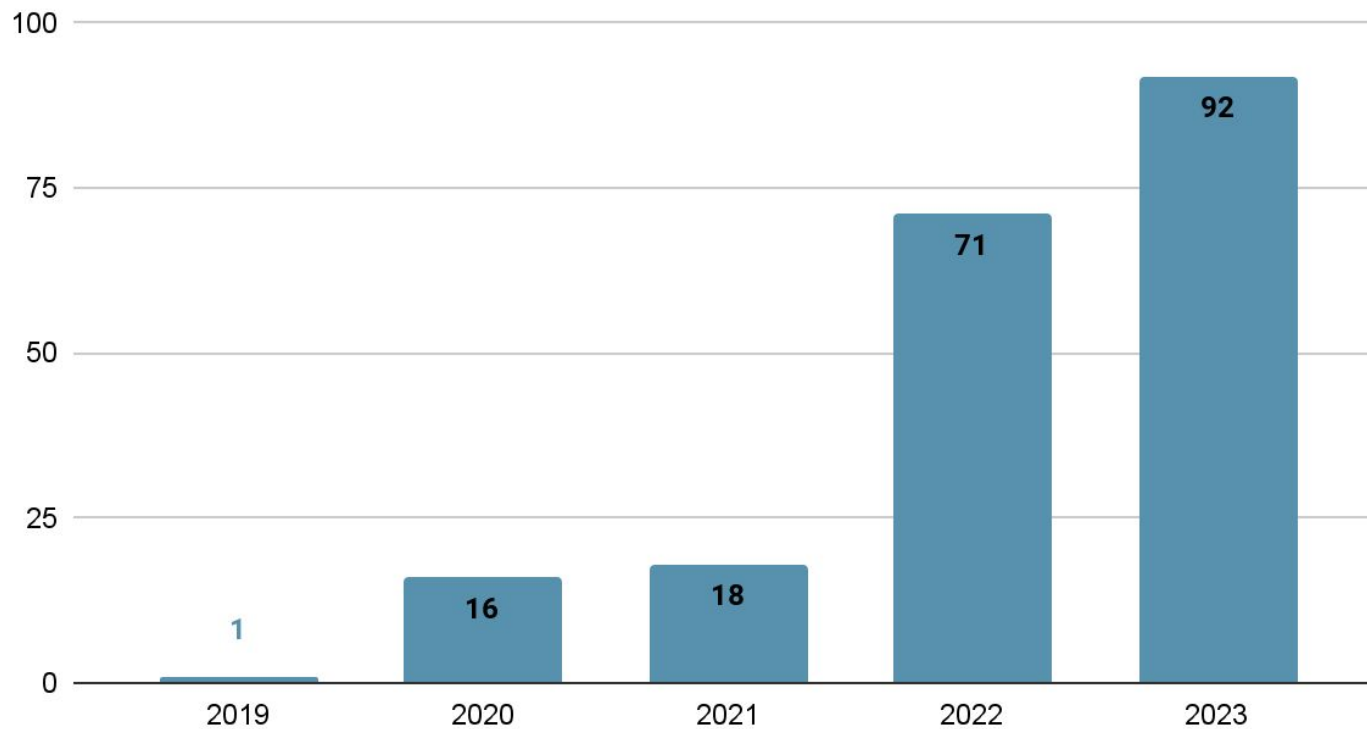




# TEMUAN ICW

## TOTAL BELANJA PEMBANGUNAN IKN MELALUI APBN

Total Pengadaan Terkait Ibu Kota Negara 2019-2023



No	Tahun	Nilai Kontrak
1	2019	Rp24,98 miliar
2	2020	Rp32,02 miliar
3	2021	Rp56,25 miliar
4	2022	Rp19,43 triliun
5	2023	Rp21,08 triliun
<b>TOTAL</b>		<b>Rp40,63 triliun</b>

sumber: olah data ICW, opentender.net



Pemerintah telah melakukan sejumlah aktivitas berkaitan dengan IKN sebelum terbitnya UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

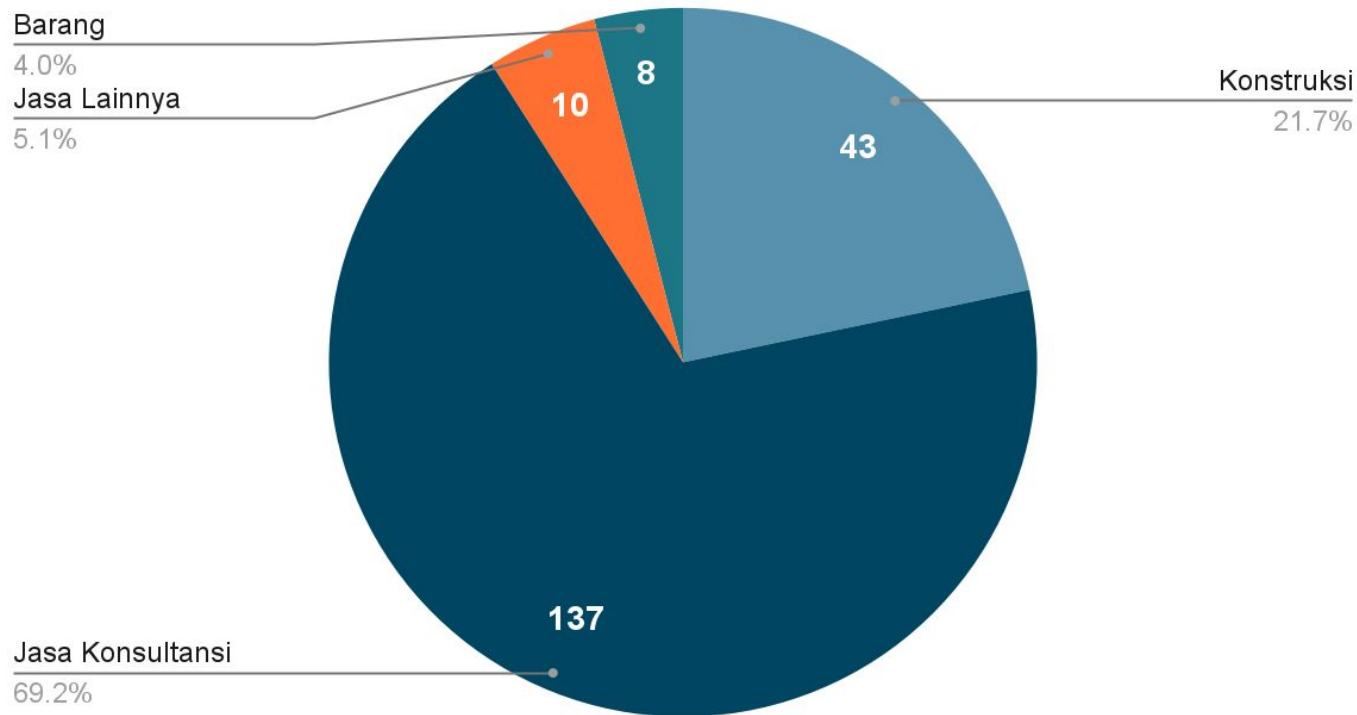


Jumlah kontrak untuk membangun Ibu Kota Negara sejak **2019 hingga 2023** sebanyak **198 paket** pengadaan dengan nilai kontrak sekitar **Rp40,63 triliun**. Sedangkan berdasarkan pernyataan **Menteri Keuangan**, Sri Mulyani, alokasi anggaran **tahun 2022-2023** sebesar **Rp5,5 triliun** dan **tahun 2023** sebesar **Rp27 triliun**. Jadi, alokasi anggaran yang diasumsikan sudah dibelanjakan adalah sebesar **Rp32,5 triliun**. Artinya, ada selisih sekitar **Rp8 triliun** yang luput untuk disampaikan oleh Menteri Keuangan.



# TEMUAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN JENIS PENGADAAN

Total Pengadaan IKN Berdasarkan Jenis Pengadaan



No	Tahun	Nilai Kontrak
1	Konstruksi	Rp38,16 triliun
2	Jasa Konsultansi	Rp2,41 triliun
3	Jasa Lainnya	Rp36,83 miliar
4	Barang	Rp7,33 miliar
<b>TOTAL</b>		<b>Rp40,63 triliun</b>

sumber: olah data ICW, opentender.net



Jasa konsultansi merupakan jenis pengadaan yang paling dominan dilakukan oleh Pemerintah, seperti: merekrut jasa konsultan. Meski demikian, **belanja paling besar** untuk membangun IKN adalah **pekerjaan konstruksi** senilai **Rp38,16 triliun** atau sekitar **93,94 persen**



# TEMUAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN INSTITUSI (5 NILAI PROYEK TERBESAR)

No	Nama Institusi	Jumlah Proyek	Nilai Proyek
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	105	Rp40,42 triliun
2	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	28	Rp62,30 miliar
3	Kementerian Investasi	2	Rp40,41 miliar
4	Kementerian Perhubungan	27	Rp35,62 miliar
5	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13	Rp20,82 miliar

sumber: olah data ICW, opentender.net



## **Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

merupakan lembaga yang mendapatkan mandat besar untuk mengerjakan pembangunan IKN. Hal ini tergambar dari total proyek yang dikelola oleh mereka.



# Deputi KPK: Anggaran Bangun Jembatan Rp 2 M, Setengahnya Habis untuk Margin, Suap, dan PPN

Beranda > News

## Deputi KPK Ungkap Fenomena Korupsi: Bangun Jembatan Rp 1 M, Anggarannya Rp 2 M

kumparanNEWS

6 Maret 2024 17:02 WIB · waktu baca 2 menit



Home

Nasional

Korupsi

## Deputi KPK Ungkap Dana Bangun Jembatan Rp 2 M tapi Setengahnya untuk Suap, Margin, dan PPN

Rabu, 6 Maret 2024 22:02 WIB

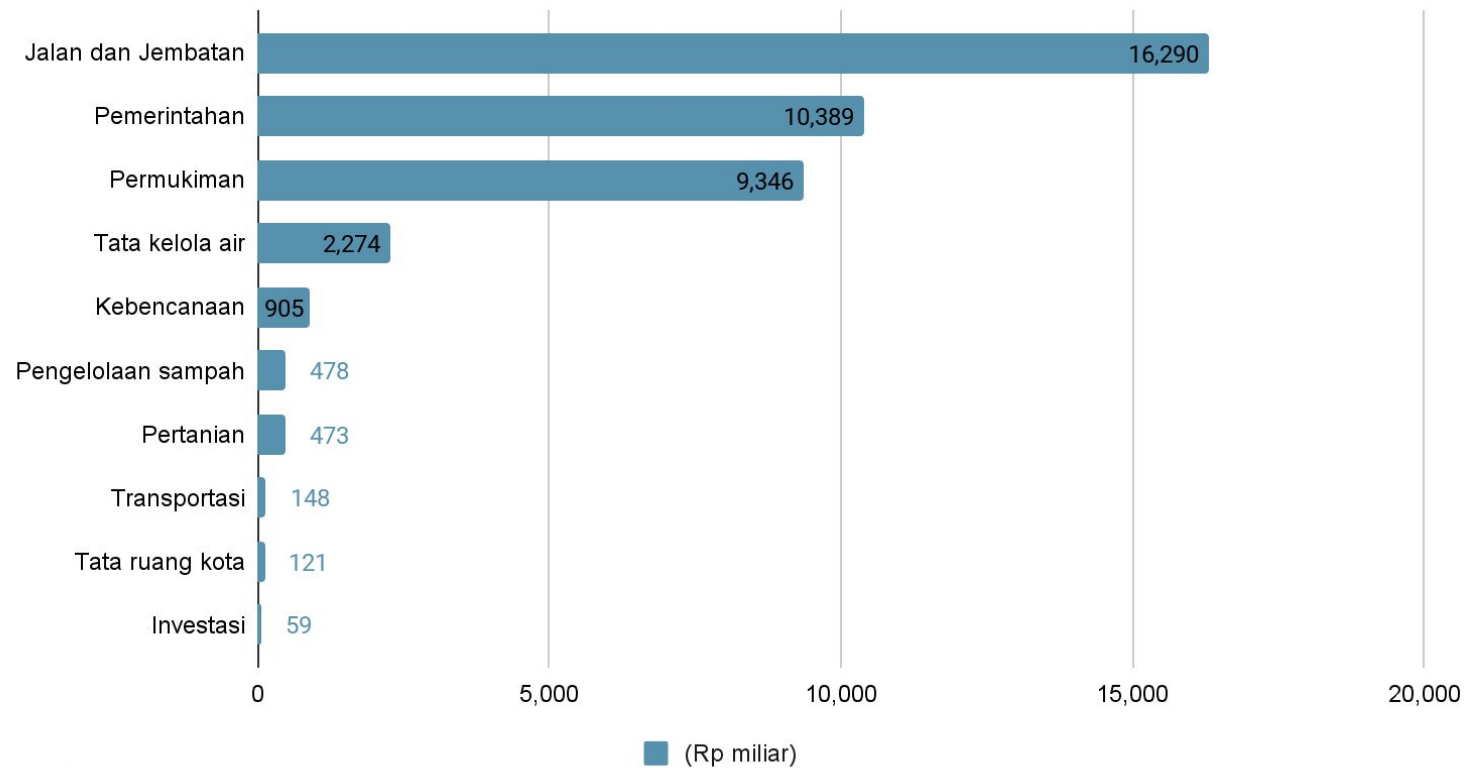
Menurut Koordinator Pelaksana Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pahala Nainggolan, **50 persen anggaran habis untuk keuntungan perusahaan, suap, dan PPN.**





# TEMUAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN KATEGORI (10 TERBESAR)

Nilai Proyek Pembangunan IKN Berdasarkan Kategori



sumber: olah data ICW, opentender.net

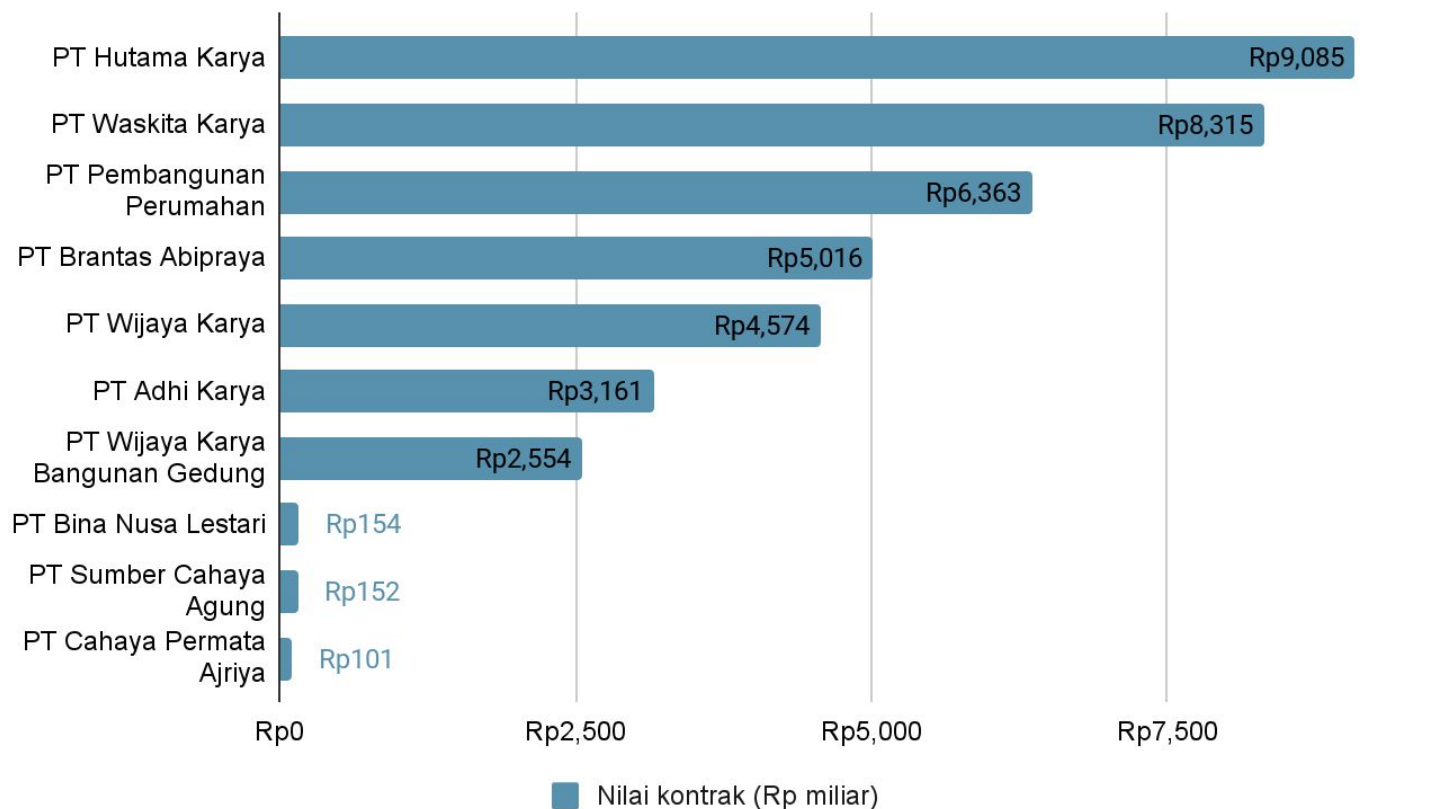


**122 perusahaan** telah dipilih oleh panitia pengadaan untuk dapat mengerjakan proyek pembangunan IKN. Berikut 10 perusahaan yang paling banyak mengelola anggaran.



# TEMUAN PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN 10 PEMENANG TERBESAR

## 10 Penyedia Terbesar



sumber: olah data ICW, opentender.net



**7 dari 10** perusahaan yang mendapatkan proyek terbesar untuk pembangunan IKN adalah BUMN. **4 dari 7 BUMN merupakan entitas yang pernah tersangkut korupsi.** Namun **hanya 1 dari 3** yang pernah dikenakan sanksi *blacklist*, yaitu PT Waskita Karya. Selebihnya belum pernah diberikan sanksi *blacklist*.



# DAFTAR HITAM AKTIF PT WASKITA KARYA

INAPROC LKPP, JAKARTA, INDONESIA 144 KONTAK BAHASA INDONESIA ENGLISH

TENDER PRODUK RUP LPSE DAFTAR HITAM UNDUH SATU DATA BERITA TENTANG KAMI TAUTAN

## DAFTAR HITAM AKTIF

396 Aktif 4223 Selesai 2 Penundaan 56 Batal

Semua Provinsi waskita karya CARI

Penyedia	Alamat	Daftar Hitam								
PT. Waskita Karya (Persero) NPWP: 40.059.441.2-002.000	Adm. Kepulauan Seribu (Kab.), DKI Jakarta JL. M.T Haryono Kav. No. 10 Cawang	<table border="1"><tr><td>Status</td><td>Tayang</td></tr><tr><td>Tanggal Penayangan</td><td>29 Mei 2024</td></tr><tr><td>Masa Berlaku Sanksi</td><td>28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2025</td></tr><tr><td>SK Penetapan</td><td>PA/KPA DIREKTORAT JENDERA...</td></tr></table>	Status	Tayang	Tanggal Penayangan	29 Mei 2024	Masa Berlaku Sanksi	28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2025	SK Penetapan	PA/KPA DIREKTORAT JENDERA...
Status	Tayang									
Tanggal Penayangan	29 Mei 2024									
Masa Berlaku Sanksi	28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2025									
SK Penetapan	PA/KPA DIREKTORAT JENDERA...									

© 2013 - 2024 LKPP • LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH • INAPROC V5.0 / 5 JUN 2024 14:17

sumber: inaproc.id

## Detail Daftar Hitam

### Detail Penyedia

Nama Penyedia	PT. Waskita Karya (Persero)
NPWP	40.059.441.2-002.000
Alamat	JL. M.T Haryono Kav. No. 10 Cawang Jl. MT. Haryono Kav. No. 12-13 Bidaracina, Jati negara
Provinsi	DKI Jakarta
Kabupaten	Adm. Kepulauan Seribu (Kab.)

### Daftar Pelanggaran

SK Penetapan	Pelanggaran	Nama KLPD	Nama Satker	Masa Berlaku Sanksi	Tanggal Penayangan
No : 72.K/ KU.01/ KPA/2024	Peraturan LKPP No. 4 Tahun 2021 Lampiran II angka 3.1 huruf g Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa	Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	28 Mei 2024 s/d 28 Mei 2025	29 Mei 2024

# KASUS KORUPSI YANG MELIBATKAN BUMN

No	Nama BUMN	Kasus Korupsi
1	PT Utama Karya	PT Utama Karya terjerat kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Tahap II Rokan Hilir, Riau dengan jumlah Rp 40,8 miliar. Budi Harto sebagai Direktur Utama PT Utama Karya dan Hilda Savitri sebagai Direktur Keuangan, memenuhi panggilan dari tim penyidik di Gedung KPK. KPK telah menetapkan Dudy Jocom, Bambang Mustaqim sebagai Mantan Senior Manager Pemasaran Regional I PT Utama Karya dan Budi Rachmat Kurniawan sebagai General Manager Divisi Gedung PT Utama Karya.
2	PT Waskita Karya	Direktur PT Waskita Karya, Destiawan Soewardjono, terseret kasus korupsi penyimpangan dan penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016-2020. Dalam kasus ini Destiawan disebut memerintahkan dan menyetujui pencairan dana <i>supply chain financing</i> (SCF) dengan cara memalsukan dokumen pendukung yang digunakan untuk menutupi hutang dari implikasi pencairan pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif. BPKP memperkirakan kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan korupsi tersebut sebesar Rp2,54 triliun.
3	PT Brantas Abipraya	Sudi Wantoko yang saat itu menjadi Mantan Direktur Keuangan dan <i>Human Capital</i> PT Brantas Abipraya, dikenakan hukuman 4 tahun penjara. Ia terbukti melakukan korupsi terhadap dana perusahaan hingga Rp4,7 miliar yang untuk kepentingan pribadi. Kasus diawali ketika Sudi memiliki tanggung jawab dalam mengatur lalu lintas keuangan perusahaan yang sahamnya 100% dikuasai oleh pemerintah. Sudi mengotak-atik data keuangan perusahaan, salah satunya dalam alokasi biaya golf perusahaan untuk menjamu rekanan dimana seakan-akan adanya pengeluaran dana, namun hanya fiktif belaka.
4	PT Wijaya Karya	Pada 28 Januari 2021 I Ketut Suarbawa sebagai Manajer Wilayah II/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya Persero, melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Waterfront City multi years. Korupsi tersebut dilakukan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Pemerintah Kab. Kampar dengan tahun anggaran 2015- 2016. Kemudian Ia dijadikan sebagai tersangka pada tahun 2019 dengan total kerugian negara sebanyak Rp 50 miliar.



# POTENSI RISIKO KECURANGAN PADA PEMBANGUNAN IKN BERDASARKAN OPENTENDER.NET

Indikator	Keterangan	Scoring
Nilai	Nilai kontrak	<b>[1]:</b> Rp0 - Rp500 juta; <b>[2]:</b> >Rp500 juta - Rp1 miliar; <b>[3]:</b> >Rp1 miliar - Rp5 miliar; <b>[4]:</b> >Rp5 miliar - Rp10 miliar; <b>[5]:</b> >Rp10 miliar
Efisiensi	Perbandingan nilai kontrak dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<b>[1]:</b> 4-7,99%; <b>[2]:</b> 3-3,99% <b>ATAU</b> 8-11,99%; <b>[3]:</b> 2-2,99% <b>ATAU</b> 12-15,99%; <b>[4]:</b> 1-1,99% <b>ATAU</b> 16-19,99%; <b>[5]:</b> 0-0,99% <b>ATAU</b> >= 20% <b>ATAU</b> nilai kontrak di atas nilai HPS
Jadwal	Pekerjaan di akhir tahun	<b>[1]:</b> Januari - Juni; <b>[2]:</b> Juli - September; <b>[3]:</b> Oktober; <b>[4]:</b> November; <b>[5]:</b> Desember
Monopoli	Jumlah kontrak yang dimenangkan perusahaan penyedia dalam tahun anggaran yang sama	<b>[1]:</b> 1 kali; <b>[2]:</b> 2 kali; <b>[3]:</b> 3 kali; <b>[4]:</b> 4 kali; <b>[5]:</b> >5 kali
Durasi	Waktu antara pengumuman dan penetapan pemenang	<b>[1]:</b> 0-25 hari; <b>[2]:</b> 26-35 hari; <b>[3]:</b> 36-45 hari; <b>[4]:</b> 46-70 hari; <b>[5]:</b> >70 hari
Judul	Jumlah karakter dalam judul	<b>[1]:</b> 0-20 karakter; <b>[2]:</b> 21-40 karakter; <b>[3]:</b> 41-60 karakter; <b>[4]:</b> 61-80 karakter; <b>[5]:</b> >80 karakter
Deskripsi	Jumlah karakter dalam deskripsi	<b>[1]:</b> 0-60 karakter; <b>[2]:</b> 61-120 karakter; <b>[3]:</b> 121-180 karakter; <b>[4]:</b> 181-240 karakter; <b>[5]:</b> >240 karakter

 Rendah: 0-40

 Sedang: 41-70

 Tinggi: 71-100

<https://pro.opentender.net/method>



# POTENSI RISIKO KECURANGAN PADA PEMBANGUNAN IKN BERDASARKAN OPENTENDER.NET

Skor	Judul	Penyedia	KLPD	RUP	Blacklist	BAST	SPPBJ	Tanggal Pengumuman	Nilai Kontrak
71	JALAN TOL IKN SEGMENT SP. TEMPADUNG – JEMBATAN PULAU BALANG	PT. WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	✓	✗	✗	✗	13 June 2022	Rp 2.198.255.285.290,68
71	KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN PEMBANGUNAN RUMAH	PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	✓	✗	✗	✗	19 April 2023	Rp 1.708.675.652.000,00
82	Penataan Lanskap KIPP IKN	PT. NINDYA KARYA (Persero)	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	✓	✗	✗	✗	21 July 2023	Rp 88.172.567.647,18

Indikator	Total Proyek	Nilai Proyek
	40	Rp26,02 miliar
	134	Rp32,03 triliun
	24	Rp8,57 triliun

sumber: olah data ICW, opentender.net





# PROYEKSI PENGADAAN IKN 2024

Ada **106 proyek pengadaan** yang akan atau sedang atau selesai berjalan untuk pembangunan IKN dengan total anggaran sekitar **Rp25,78 triliun**. Artinya, total alokasi APBN yang telah atau akan digunakan untuk pembangunan IKN sejak **2019 hingga 2024** sebesar **Rp66,41 triliun**. Informasi lebih lanjut mengenai pengadaan tahun 2024 dapat klik [di sini](#).

sumber: [www.sirup.lkpp.go.id](http://www.sirup.lkpp.go.id)



# KESIMPULAN

1. Ada indikasi pemborosan APBN dalam pembangunan megaproyek IKN
2. Ada 24 proyek yang telah dikerjakan dan memiliki potensi kecurangan tinggi (merah) terkait pembangunan megaproyek IKN

# REKOMENDASI



1. Pemerintah membuka seluruh anggaran yang terkait megaproyek IKN secara merinci
2. Aparat penegak hukum memperketat pengawasan terhadap megaproyek IKN
3. Rekam jejak pengelola proyek dengan kasus korupsi perlu diawasi penuh
4. Evaluasi total megaproyek IKN

# TERIMA KASIH

Jika Anda mendapatkan informasi atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan menghubungi dan melaporkan ke kami melalui [icw@antikorupsi.org](mailto:icw@antikorupsi.org)

